



# **IMPLEMENTASI NSPK PELAYANAN KEFARMASIAN DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

*Dr.Zorni Fadia*

**KASUBDIT STANDARDISASI  
DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEFARMASIAN**

# OUTLINE

I. ISUE STRATEGIS

II. PERAN NSPK DALAM PENINGKATAN  
PELAYANAN KEFARMASIAN

III. NSPK YG TELAH TERSEDIA

IV. KEGIATAN 2014

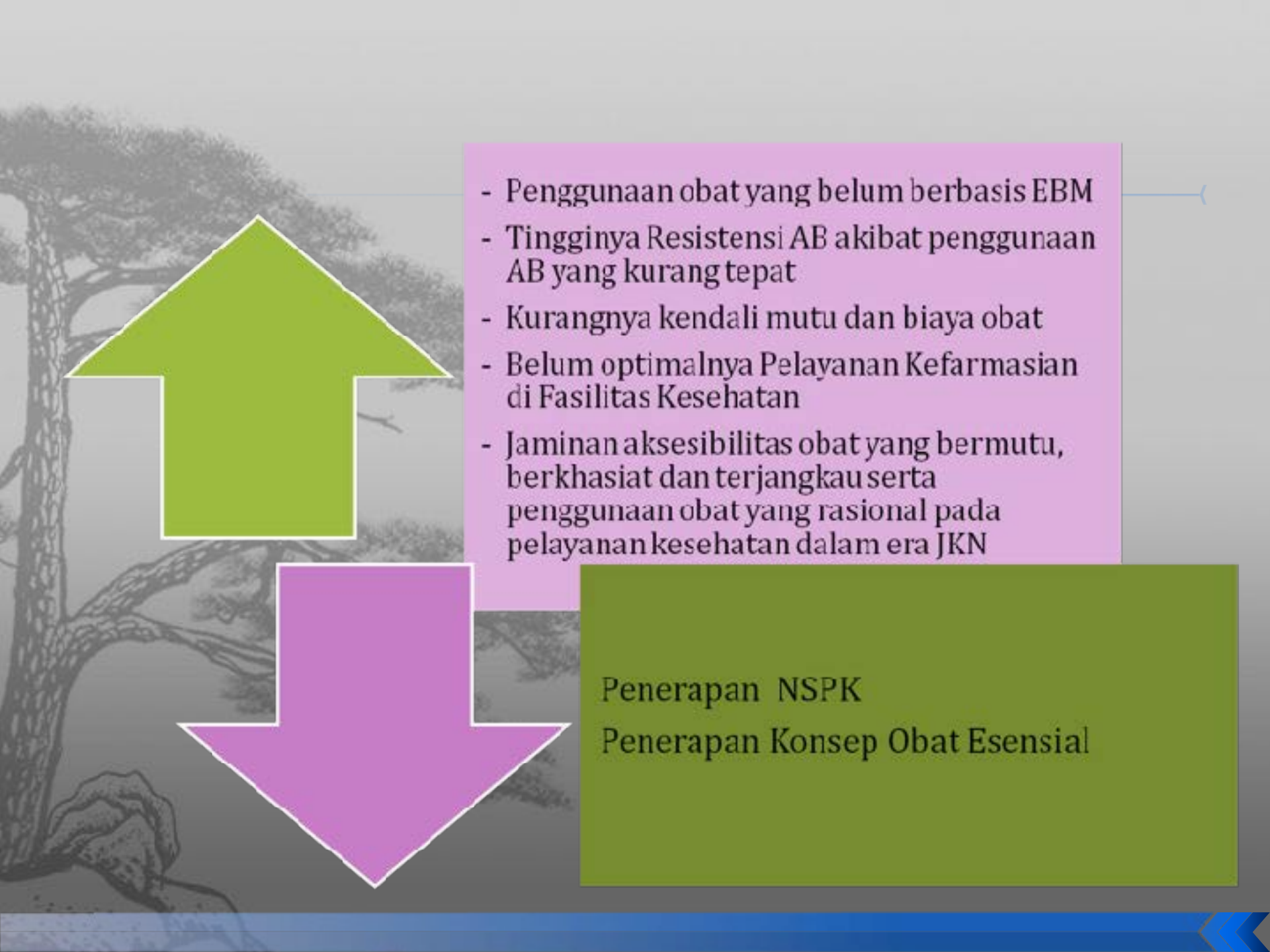
V. PENUTUP





I

- ISSUE STRATEGIS

- 
- Penggunaan obat yang belum berbasis EBM
  - Tingginya Resistensi AB akibat penggunaan AB yang kurang tepat
  - Kurangnya kendali mutu dan biaya obat
  - Belum optimalnya Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan
  - Jaminan aksesibilitas obat yang bermutu, berkhasiat dan terjangkau serta penggunaan obat yang rasional pada pelayanan kesehatan dalam era JKN

Penerapan NSPK

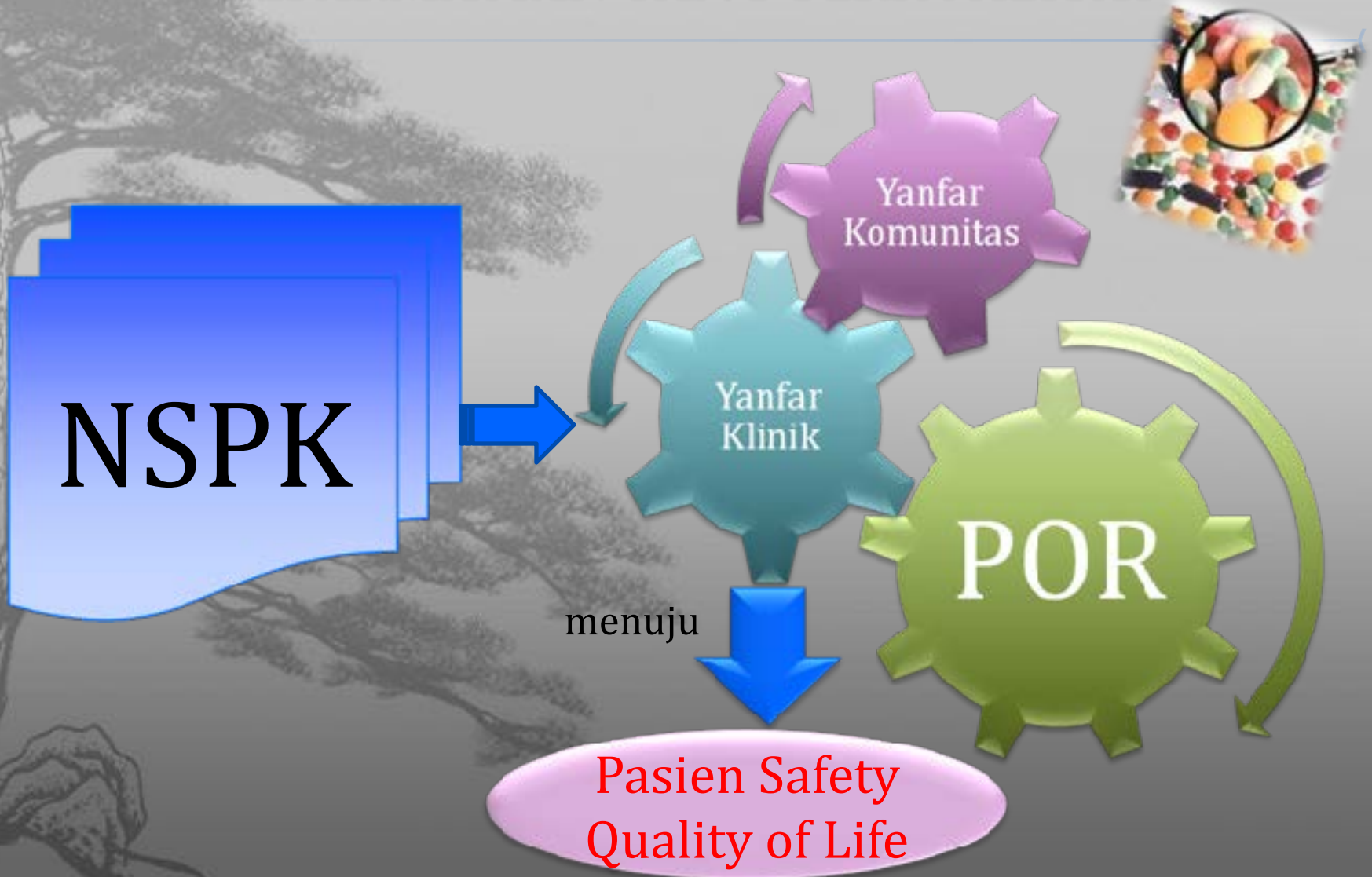
Penerapan Konsep Obat Esensial

## II

- PERAN NSPK  
DALAM  
PENINGKATAN  
PELAYANAN  
KEFARMASIAN



# PERAN NSPK DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KEFARMASIAN YANG BERKUALITAS

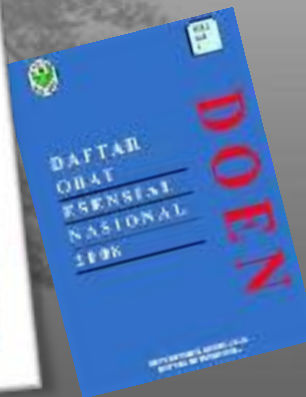


# PENETAPAN NSPK

- NORMA
- STANDAR
- PROSEDUR
- KRITERIA

Ditetapkan  
dlm bentuk  
a.l :

- STANDAR
- PEDOMAN
- JUKLAK
- JUKNIS
- dll



III

- PEDOMAN YANG TELAH TERSEDIA



# PEDOMAN DAN STANDAR KEFARMASIAN

1. Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN)
2. Formularium Nasional
3. Pedoman Pengobatan Dasar di Puskesmas
4. Pedoman Umum Penggunaan Antibiotika
5. Pedoman Penerapan Kajian Farmakoekonomi
6. Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
7. Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
8. Formularium Spesialistik Ilmu Penyakit Dalam



IV



•KEGIATAN  
2014

# KEGIATAN SUBDIT STANDARDISASI 2014

REVISI FORMULARIUM HAJI

REVIEW OBAT DALAM FORNAS DAN DOEN

PENGEMBANGAN SISTEM KODING OBAT DALAM  
FORNAS

SOSIALISASI FORNAS

ADVOKASI IMPLEMENTASI FORNAS KEPADA  
PRESCRIBER & STAKE HOLDER DI 3 REGIONAL

EVALUASI IMPLEMENTASI PEDOMAN DAN STANDAR DI  
3 WILAYAH

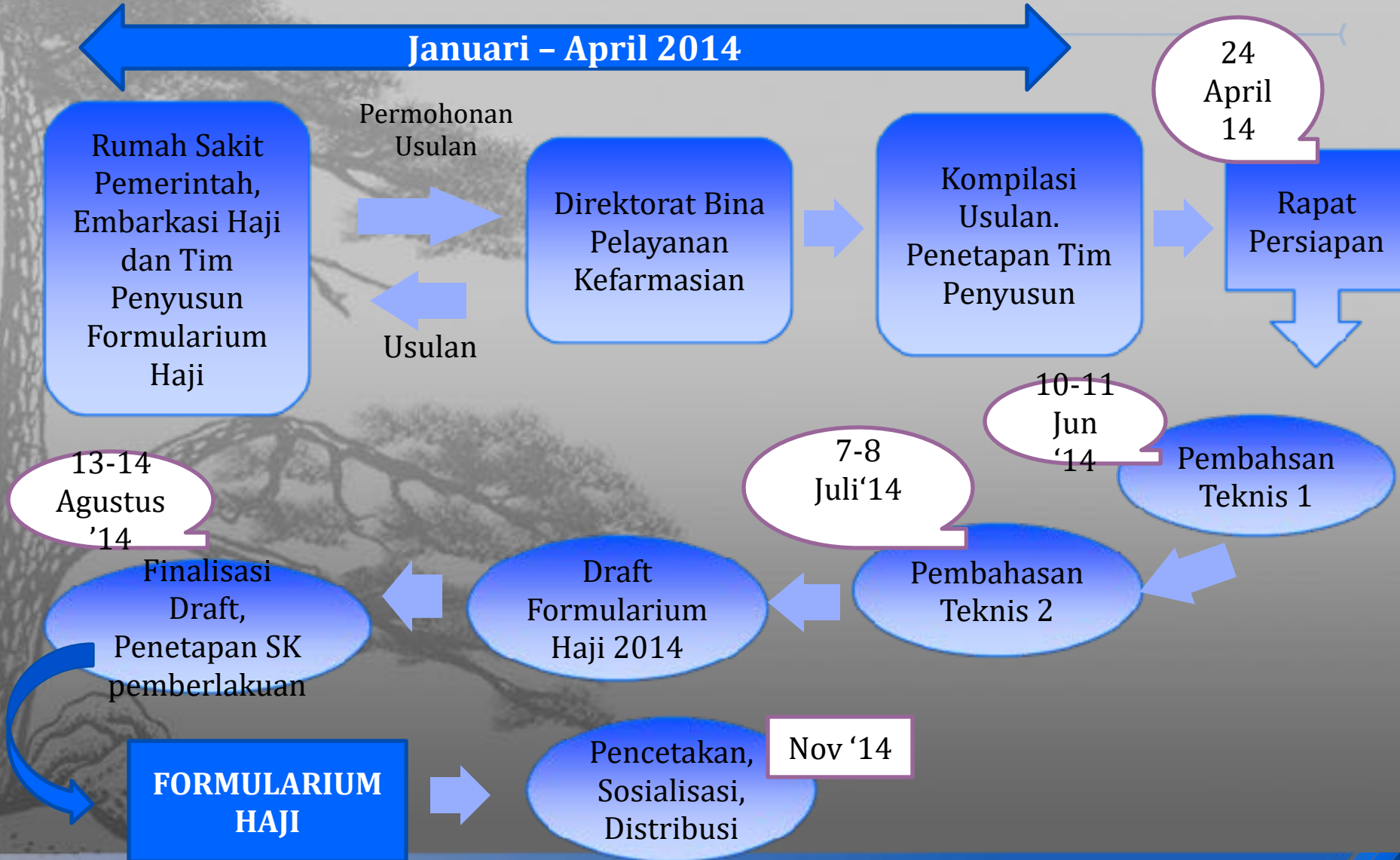
# REVISI FORMULARIUM HAJI

Tujuan	Sasaran	Kontributor	Indikator Kinerja	Output
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong penggunaan obat secara rasional kepada Jemaah haji Indonesia sesuai standar, sehingga pelayanan kesehatan lebih bermutu dengan belanja obat yang terkendali (<i>cost effective</i>)</li> <li>• Menyediakan acuan bagi tenaga medis untuk menetapkan pilihan obat yang tepat, paling <i>efficacious</i>, dan aman</li> <li>• Memudahkan perencanaan dan penyediaan obat bagi jemaah haji Indonesia sesuai dengan kebutuhan</li> </ul>	<p>Tim Tenaga Kesehatan haji dan Jemaah Haji Indonesia</p>	<p>➤ Tim ahli baik dari Rumah Sakit maupun dari Universitas, Asosiasi profesi dokter spesialisik terkait, Pusat Kesehatan Haji, Ditjen Binfar dan Alkes</p> <p>➤ SK Tim Penyusun ditetapkan oleh Menteri Kesehatan</p>	<p>Meningkat nya penggunaan obat yang rasional di fasilitas pelayanan kesehatan</p>	<p>1000 Buku Formularium Haji</p>



# TAHAPAN KEGIATAN

Januari - April 2014



# REVIEW OBAT DALAM FORNAS DAN DOEN

Tujuan	Sasaran	Kontributor	Indikator Kinerja	Output
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mendorong penggunaan obat secara rasional dalam pelayanan kesehatan di era JKN sehingga pelayanan kesehatan lebih bermutu dengan belanja obat yang terkendali (<i>cost effective</i>)</li><li>• Meningkatkan implementasi Fornas sebagai acuan bagi tenaga medis untuk menetapkan pilihan obat yang tepat, paling <i>efficacious</i>, dan aman</li><li>• Memfasilitasi konsep Fornas yang dinamis mengikuti perkembangan pengetahuan di bidang kesehatan dan obat</li></ul>	Fasyankes baik tingkat pertama maupun rujukan	<ul style="list-style-type: none"><li>-Tim Evaluasi Fornas,</li><li>- Asosiasi profesi dokter spesialisik terkait,</li><li>- Ditjen Binfar dan Alkes</li><li>- Serta unit kemkes yang terkait.</li></ul>	Meningkatnya penggunaan obat yang rasional di fasilitas pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Addendum Perubahan Fornas</li><li>- Rekomendasi untuk revisi Fornas dan DOEN 2015</li></ul>

# TAHAPAN KEGIATAN

Kompilasi  
Usulan,  
Penambah  
an/Pengur  
angan Obat  
dalam  
Fornas

Rapat  
Review 1

Rapat  
Review 2

**Efisiensi**  
Finalisasi

Jan -  
Mar

9 Apr

Juni

April -  
Jun

9 - 12  
Jul

Jul -  
Sep

30 -31  
Sep

Rapat  
Persiapa  
n

Kompilas  
i Usulan,  
Penamba  
han/Pen  
gurangan  
Obat  
dalam  
Fornas

Kompilas  
i Usulan  
Penamba  
han/Pen  
gurangan  
Obat  
dalam  
Fornas

# PENGEMBANGAN SISTEM KODING OBAT DALAM FORNAS

Tujuan	Sasaran	Kontributor	Indikator Kinerja	Output
<ul style="list-style-type: none"><li>Penyeragaman data obat dalam Sistem Informasi RS dan Puskesmas sebagai kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan</li><li>Untuk mempermudah pemantauan penggunaan obat pada pelayanan kesehatan di era JKN untuk menjamin Penggunaan Obat Rasional.</li></ul>	RS Puskesmas	Tim Farmakologi FK UGM, Ditjen BUK (D/R), Pusdatin, Ditjen Binfar dan Alkes	Pengintegrasian data obat dalam Fornas yang terkoding dalam Sistem Informasi Penggunaan Obat di fasilitas pelayanan kesehatan	Tersedianya sistem koding obat dalam Fornas yang disesuaikan dengan ATC Code dan Clinical Pathway untuk masing-masing diagnosis penyakit



# TAHAPAN KEGIATAN

Pembahasan  
Awal

Uji Coba (Pilot  
Project)

Maret -  
April

Mei

Juni

Juli

Proses  
Perkembangan  
Sistem Koding

Rapat  
Finalisasi  
Sistem Koding

# SOSIALISASI FORNAS

Tujuan	Sasaran	Kontributor	Indikator Kinerja	Output
Tersosialisasinya penerapan Fornas sebagai acuan dalam pelaksanaan Sistem jaminan Kesehatan Nasional oleh Fasyankes untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	Peserta: Stakeholder bidang Farmasi dan yankes di Prop, RS Vertikal, RSUD, Hisfarsi seluruh Indonesia dan Organisasi Profesi	Tim Komnas, Dirjen BUKR, Pusdatin, P2JK/ NCC, Dirjen Binfar dan Alkes, Dir Bina Yanfar dan Dir Bina Obat Publik dan Perbekes serta Dir Bina Prodis Alkes	Meningkatnya implementasi Fornas sebagai acuan dalam pelayanan kesehatan pada Era JKN	Meningkatnya pemahaman tentang pentingnya penerapan Fornas sebagai acuan dalam pelaksanaan JKN oleh stakeholder dan nakes agar tercapai POR di fasyankes (11 - 14 Mei )

# ADVOKASI IMPLEMENTASI FORNAS KEPADA PRESCRIBER DAN STAKE HOLDER DI 3 REGIONAL

Tujuan	Sasaran	Kontributor	Indikator Kinerja	Output
Meningkatkan penerapan Fornas sebagai acuan dalam pelaksanaan Sistem jaminan Kesehatan Nasional oleh Fasyankes untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	Peserta: Stakeholder bidang Farmasi DI Dinkes Kota dan Ka Puskesmas di kota terpilih, Ka IFRS dan Ka Komite Medik di Rumah Sakit Propinsi	Tim Komnas, Dirjen BUK, Pusdatin, P2JK/NCC, Dirjen Binfar dan Alkes, Dir Bina yanfar dan Dir Bina Obat Publik	Meningkatnya penggunaan obat yang rasional di fasilitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya pemahaman tentang pentingnya penerapan Fornas sebagai acuan dalam pelaksanaan JKN oleh stakeholder dan nakes agar tercapai POR di fasyankes Banten Jabar Sulsel

Regional

# TAHAPAN KEGIATAN



Regional Barat  
Batam (11-14 Juni)  
dan Banten (9-12 Juli)

Regional Tengah  
Jatim (1-4 September);  
Kaltim(3-6 November) dan  
Jabar (24-27 November);

Regional Timur  
Sulsel (20-23 Agustus)



# EVALUASI IMPLEMENTASI PEDOMAN DAN STANDAR DI 3 WILAYAH

Tujuan	Sasaran	Kontributor	Indikator	Output
Untuk mendapatkan data evaluasi dalam penerapan pedoman dan standar kepada prescriber dan tenaga kefarmasian di Rumah Sakit dalam rangka meningkatkan penggunaan obat secara rasional	Stakeholder bidang Farmasi di Dinkes Kab/ Kota dan Ka Puskesmas di kota terpilih, Ka IFRS dan Ka Komite Medik di Rumah Sakit Kab/Kota	Tim Komnas, Dirjen BUK, Pusdatin, P2JK/ NCC, Dirjen Binfar dan Alkes, Dir Bina Yanfar dan Dir Bina Obat Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan kefarmasian sesuai standar dan penggunaan obat yang rasional di fasilitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya pemahaman tentang pentingnya penerapan Fornas sebagai acuan dalam pelaksanaan JKN oleh stakeholder dan nakes agar tercapai POR di fasyankes

Lokal

# TAHAPAN KEGIATAN



Efisiensi

Wilayah Barat  
Lampung, 4-7  
Juni 2014

Wilayah  
Tengah  
Kalsel, 1-4  
Desember  
2014

Wilayah  
Timur  
Sulteng, 1-4  
September  
2014

# V. PENUTUP

NSPK disusun dan ditetapkan sebagai acuan Nasional dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian

NSPK sebagai pendukung dalam mewujudkan pelayanan kefarmasian yang berkualitas

Perlu kerjasama dari pemerintah propinsi dalam sosialisasi dan pengawasan penerapannya

Perlu komitmen dari semua stake holder, khususnya saryankes untuk penerapannya dlm mewujudkan Masyarakat Sehat yang mandiri dan Berkeadilan

# TERIMA KASIH

